

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan pustaka didasarkan pada penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai gambaran konsep dasar mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Selanjutnya pada bab ini penulis juga akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang membahas tentang hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, kemudian diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

##### **2.1.1 Penanaman Modal Dalam Negeri**

###### **2.1.1.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri**

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak, benda-benda (bergerak dan tidak bergerak) yang dapat disisihkan atau disediakan untuk menjalankan suatu usaha perusahaan (Setyowati, Eni dan Fatimah NH, 2013).

Menurut Harjono (2012:139) sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 25 tahun 2007, keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam UU No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, pasal 1 jo pasal 2. Menurut ketentuan tersebut penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia

termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam pasal UU No. 1 tahun 1967 bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya, dimana hal tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemiliknya sendiri atau tidak langsung, yaitu melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya seperti saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito dan tabungan berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.

Sedangkan, menurut UU No. 25 tahun 2007 pasal 1 ayat (5) dan Peraturan Presiden No. 76 tahun 2007 pasal 1 ayat (5) tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal menurut UU No. 25 tahun 2007 diantaranya untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
8. Ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Investasi**

Menurut Tri Putranto et al., (2019: 85-88) terdapat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat investasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan

Suatu investasi pasti mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi. Tingkat pengembalian atau keuntungan tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan di dalam perusahaan (internal) dan di luar perusahaan (eksternal) tersebut.

- a) Kondisi internal perusahaan

Kondisi internal perusahaan sangat memengaruhi tingkat pengembalian yang diharapkan suatu investasi. Kondisi internal perusahaan ini terdiri dari sumber daya alam, teknologi yang digunakan dan tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut. Aspek-aspek tersebut mempunyai hubungan searah dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat kualitas SDM, teknologi dan efisiensi perusahaan, maka tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi akan semakin tinggi. Begitu pula

sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia, teknologi rendah dan perusahaan kurang efisien, maka tingkat keuntungan yang akan diperoleh akan semakin rendah.

b) Kondisi eksternal perusahaan

Kondisi luar perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pengembalian atau keuntungan, antara lain kebijakan yang ditempuh pemerintah, faktor sosial politik dan faktor keamanan, pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Misalnya, apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung investasi, maka diharapkan tingkat pengembalian tersebut akan tinggi.

2. Biaya investasi

Individu atau perusahaan pada saat melakukan investasi akan mengeluarkan biaya, biaya yang dikeluarkan pada saat awal kegiatan investasi dan biasanya dalam jumlah yang besar disebut biaya investasi. Dalam suatu investasi, selain biaya investasi ada juga biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang harus dikeluarkan rutin setiap tahun selama umur investasi. Biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau *fixed cost* merupakan biaya yang jumlahnya tetap yang harus dikeluarkan pada kegiatan produksi. Sedangkan, biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya berubah, tergantung dari jumlah barang yang akan diproduksi.

3. *Marginal Efficiency of Capital* (MEC), tingkat bunga, dan *Marginal Efficiency of Investment* (MEI)

a) *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) dan tingkat bunga

*Marginal Efficiency of Capital* (MEC) menyatakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan melakukan penanaman modal. Sedangkan, suku bunga merupakan imbalan yang harus dibayarkan karena telah menggunakan sejumlah uang (biasanya dalam bentuk persen). *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) dan tingkat bunga merupakan hal yang saling berpengaruh dalam menentukan tingkat investasi. Fungsi *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) atau fungsi investasi menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat pengeluaran untuk investasi, dan hubungannya menunjukkan slope negatif. Slope negatif menunjukkan bahwa apabila tingkat bunga turun, maka besarnya investasi akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat bunga mengalami kenaikan, maka investasi akan menurun.

b) *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) dan *Marginal Efficiency of Investment* (MEI)

*Marginal Efficiency of Capital* (MEC) adalah kurva yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Sedangkan, *Marginal Efficiency of Investment* (MEI) adalah kurva yang menunjukkan hubungan diantara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan

diinvestasikan. MEC dan MEI akan sama pada saat tingkat bunga tertentu.

### **2.1.1.3 Fungsi Penting Kegiatan Investasi**

Menurut Sukirno (2000: 367) dalam Desnim Silvia (2018) terdapat tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Oleh karena itu, peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan tersebut akan selalu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja.
2. Peningkatan barang modal sebagai akibat adanya investasi akan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan, yang akan mendorong peningkatan produksi nasional dan kesempatan kerja.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Produktifitas dan pendapatan perkapita masyarakat meningkat secara signifikan sebagai akibat dari perkembangan tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan investasi memiliki fungsi yang sangat penting yaitu dapat meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional yang akan berdampak terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

### **2.1.1.4 Teori Investasi**

Menurut Priyono & Chandra (2016: 64-67) terdapat beberapa teori investasi menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

## 1. Teori konvensional (klasik)

Teori konvensional (klasik) pada intinya didasarkan atas teori produktivitas batas (*marginal productive*) dari faktor produksi modal (*capital*). Menurut teori ini, jumlah modal yang akan ditanamkan dalam proses produksi akan bergantung pada produktivitas marginalnya dibandingkan dengan tingkat bunga. Oleh karena itu, investasi akan terus dilakukan selama batas produktivitas investasi masih lebih tinggi dari tingkat bunga yang akan dibayarkan.

Fakta ini menunjukkan bahwa jenis kekayaan yang berbeda memberikan hasil yang berbeda-beda, dan juga memiliki risiko berbeda, sehingga harus dipilih dengan cara mana yang lebih baik, menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan bagi pemiliknya. Pemilik kekayaan harus memutuskan jenis investasi mana yang akan menghasilkan keuntungan tertinggi, seperti membeli saham, obligasi jangka panjang, obligasi jangka pendek, atau berinvestasi di perusahaan.

Ekonom klasik membagi investasi menjadi prinsip-prinsip maksimisasi laba dari perusahaan individual berdasarkan teori produktivitas marginal. Jika perusahaan menggunakan modalnya sampai dengan jumlah produk marginal dari modal tersebut sama dengan biaya modal, yaitu suku bunga, maka perusahaan tersebut akan memaksimalkan keuntungannya dalam situasi persaingan sempurna.

Secara garis besar teori klasik tentang investasi, diantaranya sebagai berikut:

- Apabila pendapatan dari investasi (*prospected yield*) melebihi tingkat bunga, maka investasi akan dilaksanakan. Jika ingin membandingkan antara pendapatan dari investasi dengan suku bunga maka tidak terkecuali bahwa barang-barang modal umumnya mempunyai penggunaan jangka panjang dan tidak satu kali pakai. Oleh karena itu, jumlah pendapatan dari investasi (yang akan dibandingkan dengan bunga) yaitu terdiri dari jumlah pendapatan yang akan diterima pada setiap akhir tahun, selama penggunaan barang modal itu dalam produksi (umur ekonomis), jumlah pendapatan setiap tahun selanjutnya dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku saat ini.
- Apabila biaya ditambah bunga lebih kecil dari hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut, maka investasi pada barang modal akan lebih menguntungkan. Oleh karena itu, unsur-unsur yang menjadi pertimbangan dalam menentukan investasi yaitu tingkat biaya atas modal, tingkat bunga, dan tingginya hasil pendapatan yang diterima.

## 2. Teori John Maynard Keynes

Menurut pandangan Keynes, *Marginal Efficiency of Investment* (MEI) digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi. Dengan melihat konsep pemikiran tersebut maka investasi akan dilaksanakan apabila MEI lebih tinggi dari tingkat bunga.

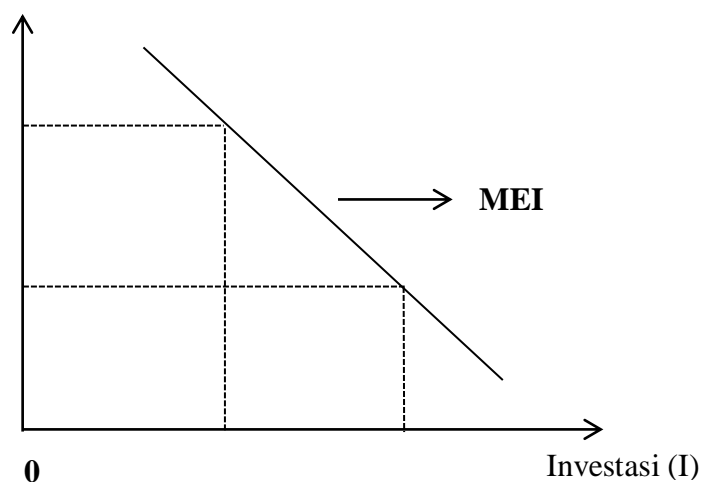


Secara grafis MEI digambarkan sebagai suatu skedul turun atau negatif, menurunnya tingkat skedul MEI diakibatkan oleh dua hal, antara lain yaitu:

- 1) Semakin tinggi jumlah investasi dalam masyarakat, maka semakin rendah MEI.
- 2) Semakin tinggi jumlah investasi, maka ongkos dan barang modal (asset) akan semakin tinggi.

Berikut merupakan skedul MEI pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Tingkat Bunga (i)



**Gambar 2.1 Marginal Efficiency of Investment (MEI)**  
Sumber: Priyono & Chandra, Esensi Ekonomi Makro (2016)

Menurut teori Keynes, faktor efisiensi marginal dari investasi merupakan kriteria utama untuk melaksanakan investasi. Efisiensi marginal ini tergantung pada perkiraan dan perhitungan pengusaha terhadap perkembangan situasi ekonomi masa depan. Akibatnya, tingkat MEI yang sebenarnya tidak dapat ditentukan dengan pasti.

## **2.1.2 Upah Minimum Provinsi**

### **2.1.2.1 Pengertian Upah Minimum Provinsi**

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2000, Bab 1, Pasal 1, Ayat 30 menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999 pasal 1 ayat (1), upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum regional tingkat I menurut pasal 1 ayat (2) adalah upah minimum yang berlaku di satu propinsi. Sedangkan, upah minimum regional tingkat II menurut pasal 1 ayat (3) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.

Menurut Sulistiawati (2012) pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung pada :

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja
3. Produktivitas marginal tenaga kerja

4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha
5. Perbedaan jenis pekerjaan.

Upah yang diberikan oleh pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal tersebut maka upah yang diterima pekerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Upah nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
2. Upah riil, yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut (Sukirno, 2008:351).

Kebijakan upah di Indonesia mengacu pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang tenaga kerja menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditentukan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral. Peraturan menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral

pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral ditingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut.

### **2.1.2.2 Tujuan Penetapan Upah Minimum**

Menurut Marpaung et al., (2019) tujuan penetapan upah minimum dibagi menjadi dua yaitu tujuan makro dan tujuan mikro. Tujuan makro, diantaranya:

1. Pemerataan. Kenaikan upah minimum akan mengurangi kesenjangan antara pekerja/buruh tingkat bawah dan tingkat paling atas.
2. Peningkatan daya beli pekerja/buruh. Kenaikan upah minimum secara langsung akan meningkatkan daya beli pekerja/buruh yang akan mendorong ekonomi rakyat.
3. Perubahan struktur keuangan perusahaan. Kenaikan upah minimum akan memperbaiki atau merubah struktur upah terhadap struktur biaya produksi.
4. Peningkatan produktivitas. kenaikan upah minimum akan memberikan insentif bagi pekerja/buruh untuk bekerja lebih giat yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Sedangkan, tujuan mikro diantaranya:

1. Sebagai jaring pengaman, agar upah minimum tidak semakin menurun
2. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dengan upah tertinggi
3. Meningkatkan penghasilan pekerja/buruh tingkat terendah
4. Meningkatkan etos dan disiplin kerja

5. Memperlancar komunikasi antara pekerja/buruh dan pengusaha.

### 2.1.2.3 Teori Upah

Menurut Burt (1963) dalam bukunya berjudul “*Labor Market and Government Policies*” terdapat beberapa teori yang menjelaskan proses penentuan upah dan faktor-faktor yang memengaruhi upah pekerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori kebutuhan hidup (*subsistence theory*)

*Subsistence theory* atau disebut juga teori upah alami yang dikemukakan oleh David Ricardo (1817). Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan hanya dipengaruhi oleh kepentingan untuk menutup biaya hidup kebutuhan pekerja dan keluarganya. Jika tingkat upah naik diatas biaya hidup minimum pekerja, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan menyebabkan tingkat upah menurun. Jika tingkat upah berada dibawah biaya minimum, maka kekuatan penawaran tenaga kerja akan menurun.

2. Teori upah besi

Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Teori ini menjelaskan bahwa adanya *subsistencency theory* kepentingan pekerja tidak terlindungi, sehingga peran serikat pekerja dalam melindungi kepentingan pekerja menjadi hal yang penting. Dengan adanya serikat pekerja tersebut, pekerja akan berusaha untuk menuntut upah yang lebih besar dari kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Teori ini cenderung merugikan kepentingan

pengusaha dan pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan para pengusaha akan disulitkan dengan kenaikan biaya produksi.

3. *Wage fund theory*

Teori ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah. Peningkatan tabungan akan meningkatkan nilai investasi pada sektor-sektor ekonomi, sehingga sektor ekonomi tersebut berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya, yaitu dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Peningkatan modal menyebabkan kenaikan upah pekerja karena permintaan tenaga kerja meningkat. Teori ini juga mengungkapkan bahwa pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan penurunan tingkat upah, hal tersebut karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam teori ini dijelaskan bahwa tingkat upah hanya dapat ditingkatkan dengan mengurangi penawaran tenaga kerja dan meningkatkan tabungan.

4. *Marginal productivity teory*

Teori ini menjelaskan bahwa dalam upaya memaksimalkan keuntungan setiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa, sehingga tiap faktor produksi yang digunakan menerima atau memperoleh imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Atau dengan kata lain, nilai pertambahan hasil

marginal seorang pekerja sama dengan upah yang diterima pekerja. Teori ini menyatakan bahwa pekerja menerima upah sesuai dengan produktivitas marginalnya terhadap pengusaha.

### **2.1.3 Suku Bunga**

#### **2.1.3.1 Pengertian Suku Bunga**

Suku bunga merupakan jumlah yang dibayarkan dalam rupiah akibat telah mempergunakan dana sebagai balas jasa. Perubahan suku bunga merupakan perubahan dalam permintaan uang (kredit). Kenaikan suku bunga menyebabkan penurunan permintaan agregat/pengeluaran investasi. Namun sebaliknya, penurunan suku bunga akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat (Rompas, 2018).

Menurut Kasmir (2002: 121) suku bunga adalah biaya dari penggunaan uang atau dapat dianggap sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu atau biaya dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam persentase (%). Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan nasabah yang harus membayar kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

1. Bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai ransangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh: jasa.
2. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Sebagai contoh: bunga kredit.

### **2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Suku Bunga**

Menurut Andrianto et al., (2019) agar bank dapat memperoleh keuntungan dengan maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar-kecilnya komponen suku bunga. Hal ini diakibatkan karena apabila terdapat kesalahan dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga maka dapat merugikan bank itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penentuan suku bunga, yaitu:

1. Kebutuhan dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan yaitu, seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Jika bank kekurangan dana, sementara jumlah pinjaman meningkat, maka yang dilakukan bank agar dana tersebut cepat terpenuhi yaitu dengan meningkatkan suku bunga pinjaman. Namun, peningkatan suku bunga simpanan juga akan meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit maka bunga simpanan akan turun.



## 2. Target laba yang diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan karena target laba merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan tinggi, maka bunga pinjaman juga tinggi dan demikian sebaliknya. Namun, untuk menghadapi pesaing target laba dapat diturunkan seminimal mungkin.

## 3. Kualitas jaminan

Kualitas jaminan juga diperuntukan untuk bunga. Semakin likuid jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan demikian sebaliknya. Sebagai contoh, jaminan sertifikat deposito tentunya berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan jika kredit yang diberikan menjadi bermasalah. Bagi bank yang memiliki jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito dapat langsung dibekukan dan langsung dicairkan untuk membayar tunggakan kredit yang bermasalah tersebut. Tentunya hal ini memiliki keunggulan atas pencairan jaminan dibandingkan dengan sertifikat tanah.

## 4. Kebijakan pemerintah

Dalam menentukan bunga simpanan maupun bunga pinjaman, bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ada batas maksimum dan minimum untuk suku bunga yang diperbolehkan. Tujuannya agar bank dapat bersaing secara ketat.

#### 5. Jangka waktu

Baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi tingkat bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko macet dimasa mendatang. Demikian pula, jika pinjaman berjangka waktu pendek, maka tingkat bunga relatif rendah. Akan tetapi untuk bunga simpanan berlaku sebaliknya, semakin panjang jangka waktu maka bunga simpanan semakin rendah dan sebaliknya.

#### 6. Reputasi perusahaan

Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Itikad baik perusahaan yang akan mendapatkan kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena pada umumnya perusahaan yang beritikad baik kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan demikian sebaliknya perusahaan yang kurang beritikad baik faktor risiko kredit macet cukup besar.

#### 7. Produk yang kompetitif

Produk yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya pinjaman. Kompetitif berarti bahwa produk yang dibayar adalah yang paling banyak terjual di pasar. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

#### 8. Hubungan baik

Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam prakteknya, bank menggolongkan nasabahnya menjadi nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan pada peran nasabah melakukan transaksi diperbankan baik untuk transaksi simpanan, pinjaman dan jasa bank lainnya. Nasabah utama biasanya memiliki hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga ketika menentukan tingkat bunga berbeda dengan nasabah biasa. Hal ini sering terjadi pada nasabah simpanan. Selain pada kegiatan transaksi simpanan, utamanya nasabah utama juga sering melakukan kegiatan transaksi pinjaman. Dimana pada saat nasabah mengajukan pinjaman, nasabah selalu mencari keringanan persyaratan kredit dan nasabah dalam membayar kewajiban pinjamannya tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran atau tepat jatuh tempo.

#### 9. Persaingan

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana sementara maka tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing ketat dengan bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata pesaing 15 persen, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan ditingkatkan diatas bunga pesaing misalnya 16 persen. Namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing agar dana yang memupuk dapat tersalurkan.

### 2.1.3.3 Teori Suku Bunga

Menurut Sumartik dan Hariasih (2019: 74-77) terdapat dua teori tingkat suku bunga, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Teori klasik

Teori bunga klasik disebut "*The Pure Theory of Interest*". Menurut teori ini, tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Jadi modal telah dianggap sebagai harga dari kesempatan penggunaan modal. Sama seperti harga barang-barang dan jasa, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal.

Menurut teori klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga pada perekonomian yang akan memengaruhi tabungan (*saving*) yang terjadi. Hal ini berarti keinginan masyarakat untuk menabung sangat bergantung pada tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung atau masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan pengeluaran guna meningkatkan jumlah tabungan. Jadi tingkat bunga menurut klasik merupakan balas jasa yang diterima seseorang karena menabung atau hadiah yang diterima seseorang karena telah menunda konsumsinya.

#### 2. Teori Keynes

Teori ini dikemukakan oleh Keynes dan disebut dengan "*Liquidity Preference Theory of Interest*". Menurut Keynes tingkat bunga ditentukan oleh *preference* dan *supply of money*. *Liquidity preference* adalah dorongan untuk memegang atau menyimpan uang didasarkan tiga alasan

yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan motif spekulasi. Ahli-ahli ekonomi sesudah klasik pada umumnya memberikan sokongan pada pandangan Keynes yang berkeyakinan bahwa tingkat bunga merupakan imbalan yang diterima seseorang karena orang tersebut telah mengorbankan *liquidity preference* (permintaan uang).

Permintaan uang memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat bunga. Menurut Keynes, masyarakat memiliki pendapat tentang adanya tingkat bunga nominal (*natural rate*). Apabila tingkat bunga turun dari tingkat bunga nominal dalam masyarakat ada suatu keyakinan memegang obligasi (surat berharga) pada saat suku bunga naik (harga obligasi mengalami penurunan) pemegang obligasi tersebut akan menderita kerugian (*capital loss*). Menjual obligasi secara terpisah untuk mendapatkan uang kas merupakan langkah yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut, dan uang kas tersebut dapat disimpan pada saat suku bunga naik. Hubungan ini disebut sebagai motif spekulasi permintaan uang, karena masyarakat akan melakukan spekulasi tentang obligasi dimasa yang akan datang.

Tanggapan Keynes yang kedua yaitu berhubungan dengan ongkos (harga) memegang uang kas, karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin besar ongkos memegang uang kas. Hal ini akan menyebabkan keinginan memegang uang kas juga akan makin menurun. Bila tingkat bunga turun berarti ongkos memegang uang rendah, sehingga permintaan uang kas naik. Permintaan ini akan menentukan tingkat bunga.

## **2.1.4 Inflasi**

### **2.1.4.1 Pengertian Inflasi**

Basuki dan Prawoto (2014) dalam buku pengantar teori ekonomi menjelaskan bahwa menurut Boediono (1985: 161) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan secara terus-menerus. Menurut Nopirin (1990: 25) inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama tahun tertentu. Menurut Mannullang (1993: 83) inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi senantiasa turunnya nilai uang. Sedangkan, menurut Samuelson dan Nordhaus (1993: 293) inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, harga beras, bahan bakar, harga mobil naik, tingkat upah, harga tanah, dan semua barang-barang modal naik.

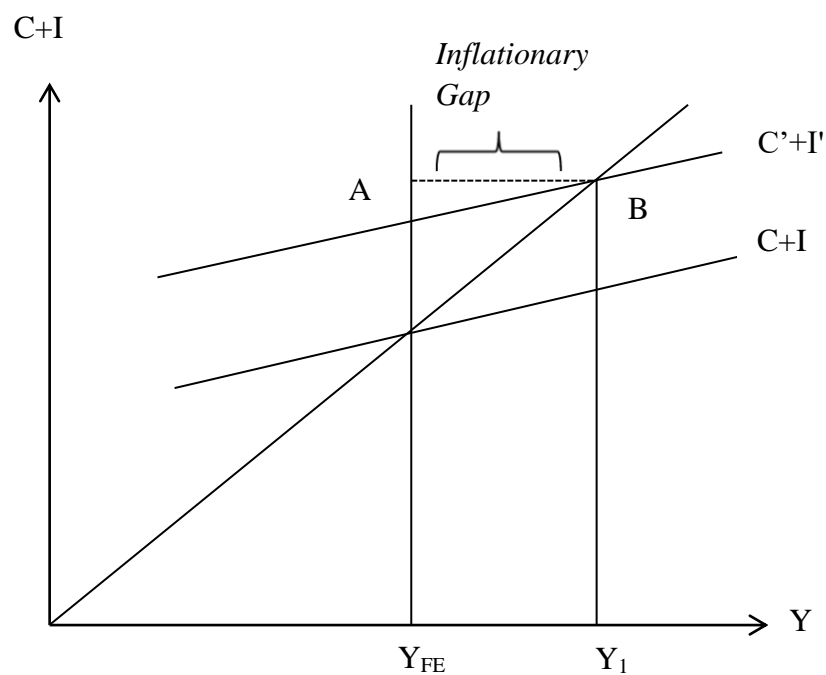
Berdasarkan definisi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus disebabkan oleh turunnya nilai uang pada suatu tahun tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang naik dengan persentase yang sama. Namun, kemungkinan adanya kenaikan tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu tahun tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

### 2.1.4.2 Penyebab Inflasi

Menurut Boediono (1995: 53-55) berdasarkan sebab terjadinya inflasi terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

#### 1. *Demand pull inflation*

*Demand pull inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan saat produksi berada pada keadaan kesempatan kerja penuh. Jika kesempatan kerja penuh (*full employment*) tercapai, permintaan tambahan selanjutnya hanya akan menaikkan harga. Jika peningkatan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada diatas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh, maka terjadi *inflationary gap* dan akan terjadi inflasi. Terjadinya *inflationary gap* secara grafik digambarkan sebagai berikut:

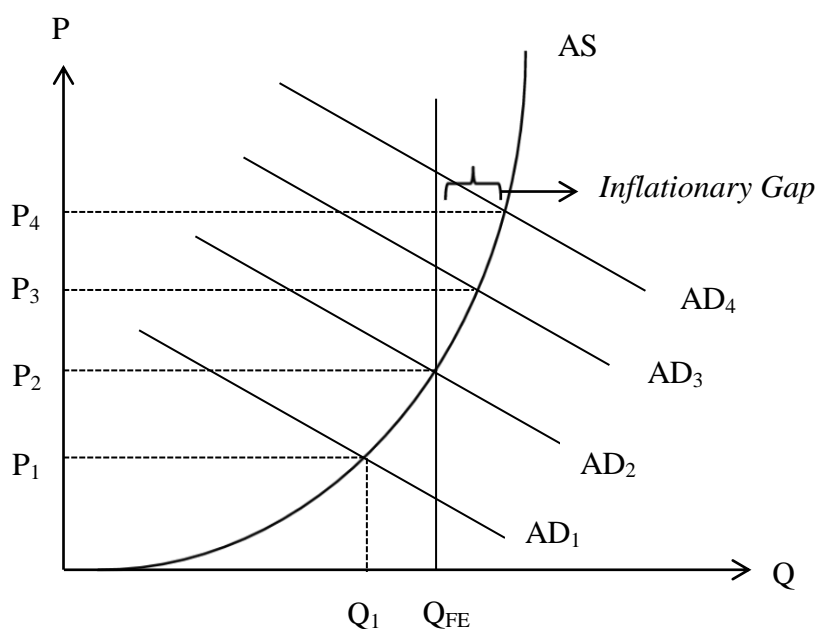


**Gambar 2.2 Inflationary Gap**

Sumber: Boediono, Ekonomi Makro: Edisi Keempat (1995)

Peningkatan pengeluaran total dari  $C+I$  menjadi  $C'+I'$  akan menghasilkan keseimbangan pada titik B berada di atas GNP *full employment* ( $Y_{FE}$ ). Jarak A - B atau  $Y_{FE} - Y_1$  menunjukkan terjadinya *inflationary gap*.

Dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran total, proses terjadinya *demand pull inflation* dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar 2.3 Demand Pull Inflation**

Sumber: Boediono, Ekonomi Makro: Edisi Keempat (1995)

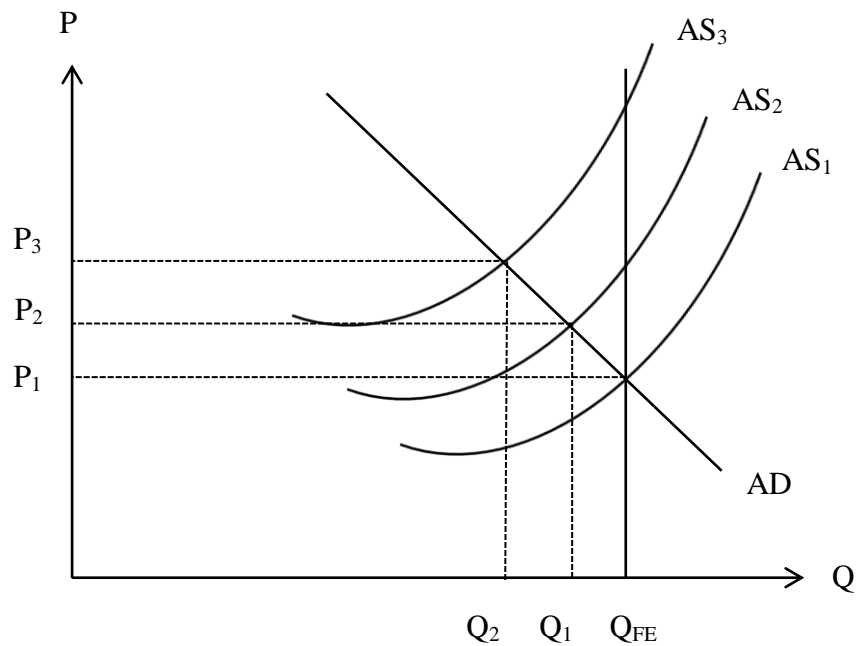
Bermula dengan harga  $P_1$  dan output  $Q_1$ , kenaikan permintaan total dari  $AD_1$  ke  $AD_2$  mengakibatkan sebagian permintaan tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya, harga naik menjadi  $P_2$  dan output naik menjadi  $Q_{FE}$ . Kenaikan berikutnya dari  $AD_2$  ke  $AD_3$  menyebabkan harga naik menjadi  $P_3$ , sementara output tetap pada  $Q_{FE}$ . Kenaikan harga



ini disebabkan oleh adanya *inflationary gap*. Proses kenaikan harga ini akan terus berlanjut selama permintaan total terus naik (misalnya menjadi  $AD_4$ ).

## 2. *Cost push inflation*

*Cost push inflation* adalah inflasi yang ditandai dengan naiknya harga dan turunnya produksi. Akibatnya, inflasi disertai resesi, yang akan menyebabkan adanya penawaran total yang turun sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Peningkatan produksi akan menaikkan harga dan menurunkan jumlah produksi. Serikat buruh yang menuntut upah yang lebih tinggi, manajer di pasar monopolistis yang dapat menentukan harga (lebih tinggi), atau kenaikan harga bahan baku, seperti krisis minyak, adalah faktor yang dapat meningkatkan biaya produksi, atau penawaran total (*aggregate supply*) terjadi akibat dari kenaikan biaya produksi. Jika proses ini terus berlanjut maka timbul *cost push inflation*. Terjadinya *cost push inflation* dapat dijelaskan oleh gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.4 Cosh Push Inflation**

Sumber: Boediono, Ekonomi Makro: Edisi Keempat (1995)

Bermula pada harga  $P_1$  dan  $Q_{FE}$ . Kenaikan biaya produksi disebabkan baik karena berhasilnya tuntutan kenaikan upah oleh serikat buruh ataupun kenaikan harga bahan baku industri, sehingga akan menggeser kurva penawaran total dari  $AS_1$  menjadi  $AS_2$ . Oleh karena itu, harga naik ke  $P_2$  dan produksi turun ke  $Q_1$ . Kenaikan harga selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi  $AS_3$ , harga naik dan produksi turun menjadi  $Q_2$ . Proses ini akan berhenti ketika AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses kenaikan harga ini (sering disertai dengan penurunan produksi) disebut dengan *cosh push inflation*.

### 2.1.4.3 Penggolongan Inflasi

Menurut Basuki dan Prawoto (2014) penggolongan inflasi berdasarkan atas besarnya laju inflasi terbagi menjadi tiga kategori, diantaranya yaitu:

1. Inflasi menyerap (*creeping inflation*)

Inflasi ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah yaitu kurang dari 10% per tahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase kecil serta dalam jangka waktu yang lama.

2. Inflasi menengah atau ganas (*galloping inflation*)

Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yaitu antara 10% sampai 50% pertahun. Sebagai konsekuensinya, masyarakat hanya memegang jumlah minimum yang diperlukan hanya untuk transaksi harian.

3. Inflasi tinggi (*hyper inflation*)

Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibat harga-harga naik menjadi 5 sampai 6 kali, masyarakat tidak mempunyai keinginan untuk menyimpan uang. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja dan ditandai dengan laju inflasi diatas 50% pertahun.

### 2.1.4.4 Dampak Inflasi

Menurut Tri Putranto et al., (2019: 106) adanya inflasi dapat menyebabkan dampak bagi perekonomian suatu negara. Dampak yang ditimbulkan bisa positif dan negatif tergantung dari tingkat inflasi, diantaranya yaitu:

## 1. Dampak Positif

Tingkat inflasi sampai pada angka tertentu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan penawaran agregat. Para ekonom sepakat bahwa tingkat inflasi yang aman adalah 5 persen per tahun. Dengan adanya inflasi (terjadi kenaikan harga barang-barang) akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Hal ini akan mendorong perekonomian menuju ke arah yang lebih baik, yaitu dapat meningkatkan orang gemar menabung, membuat bekerja lebih giat, berinvestasi dan meningkatkan pendapatan nasional.

## 2. Dampak Negatif

Jika terjadi inflasi yang tinggi ( $>10\%$  per tahun), maka akan berdampak negatif, antara lain sebagai berikut:

### 1) Menurunnya tingkat kesejahteraan

Dengan adanya inflasi, menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan tetap. Tingkat daya beli masyarakat sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin rendah daya beli masyarakat, maka semakin rendah tingkat kesejahteraannya. Misalnya, seseorang dengan penghasilan tetap 5 juta dapat memenuhi kebutuhan keluarganya selama satu bulan. Namun, karena harga barang pada umumnya meningkat seiring dengan pendapatan orang tersebut maka dengan jumlah 5 juta ini, ia tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya seperti sebelumnya. Agar pendapatannya

cukup memenuhi kebutuhan bulanannya, orang tersebut harus mengurangi pengeluarannya. Sehingga, tingkat kesejahteraan menurun.

2) Memburuknya distribusi pendapatan

Inflasi dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan. Misalnya, jika tingkat inflasi tahunan adalah 18 persen, peningkatan pendapatan selama tahun tersebut harus lebih dari 18 persen. Sehingga, akan terjadi kesenjangan pendapatan antara mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi dan mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan inflasi. Bagi mereka yang dapat menyesuaikan diri, dapat meningkatkan pendapatannya di atas inflasi. Sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri, pendapatannya tetap sama. Akibatnya, distribusi pendapatan atau kesenjangan pendapatan masyarakat semakin memburuk.

3) Terganggunya stabilitas ekonomi

Adanya inflasi yang tinggi membuat masyarakat mengharapkan bahwa kedepannya tingkat inflasi akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan konsumen akan membeli barang sebanyak mungkin untuk menghemat uang. Sedangkan produsen akan menahan barang dagangannya, karena mereka ingin menjual ketika inflasi semakin tinggi. Oleh karena itu, permintaan konsumen tidak terpenuhi yang menyebabkan laju inflasi menjadi lebih tinggi. Bahkan, kondisi ekonomi semakin buruk.

Inflasi yang tinggi menyebabkan orang cenderung tidak menabung, karena keuntungan/bunga dari tabungan akan lebih kecil dari tingkat inflasi. Jika masyarakat enggan menabung, maka sulit bagi produsen untuk mendapatkan modal pinjaman. Akibatnya, perusahaan-perusahaan bisa bangkrut, defisit neraca pembayaran, ketidakstabilan ekonomi, kegagalan dalam melaksanakan pembangunan dan menurunnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.4.5 Sumber Inflasi**

Menurut Basuki dan Prawoto (2014) sumber inflasi terbagi menjadi dua kategori, diantaranya yaitu:

##### *1. Domestic Inflation*

*Domestic inflation* adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri yang timbul karena:

- 1) Meningkatnya permintaan efektif dari masyarakat terhadap barang-barang di pasar, sedangkan kenaikan penawaran dari barang-barang tersebut tidak mampu mengimbangi laju permintaannya.
- 2) Defisit anggaran belanja dibiayai dengan mencetak uang baru.
- 3) Kenaikan biaya produksi barang dalam negeri yang mengakibatkan harga jual yang baik.

##### *2. Foreign inflation*

*Foreign inflation* adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, yang mempunyai dampak diantaranya:

- 1) Secara langsung meningkatkan Indeks Biaya Hidup (IBH) karena barang-barang yang termasuk didalamnya berasal dari impor.
- 2) Secara tidak langsung meningkatkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus di impor (*cost inflation*).
- 3) Secara tidak langsung menyebabkan peningkatan harga di dalam negeri karena kemungkinan kenaikan harga barang-barang impor yang berusaha mengimbangi pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga barang impor tersebut.

#### **2.1.4.6 Kebijakan Anti Inflasi**

Menurut Adiwarman Karim (2007: 139) dalam Mulyani (2020) inflasi dapat diatasi dengan mengurangi  $M$  (jumlah uang yang beredar) dan atau/  $V$  (kecepatan peredaran uang) atau menaikkan  $T$  (barang yang diperdagangkan). Untuk itu, terdapat tiga kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi, diantaranya yaitu:

##### **1. Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dengan tujuan untuk mengatur uang yang beredar dimasyarakat agar stabil. Untuk mengatasi inflasi, sasaran utama kebijakan moneter yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mempersulit pemberian kredit. Terdapat tiga cara yang dilakukan bank sentral untuk mengatasi inflasi, diantaranya yaitu:

- a. Politik diskonto, yaitu upaya mengatasi inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga agar masyarakat gemar menabung, dan kemudian peredaran uang dimasyarakat akan berkurang sehingga inflasi akan dapat diatasi.
  - b. Politik pasar terbuka, yaitu dengan menjual surat-surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
  - c. Politik cadangan kas, yaitu dengan menaikkan *cash ratio* yang digunakan untuk mengurangi jumlah pemberian kredit yang disediakan kepada masyarakat.
2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi inflasi yaitu dengan menurunkan pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak, dan mengadakan pinjaman pemerintah dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

3. Kebijakan Non Moneter dan Non Fiskal

Kebijakan ini dilakukan dengan menempuh peningkatan hasil produksi, menstabilkan gaji dan upah (tidak sering menaikkan), dan pengendalian harga serta distribusi barang kebutuhan kepada masyarakat.

#### **2.1.4.7 Teori Inflasi**

Menurut Utari et al., (2015: 8-14) teori inflasi dibagi menjadi dua kelompok yaitu, mereka yang menganut paham monetaris dan paham non monetaris, diantaranya sebagai berikut:



### 1. Teori Monetarist (*Classical Theory On Inflation*)

Teori klasik menganut paham monetaris. Teori ini menyatakan bahwa penawaran (*supply*) uang atau jumlah uang beredar dalam perekonomian memiliki hubungan langsung dengan perubahan tingkat harga. Peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong tingkat harga bergerak keatas, demikian pula sebaliknya. Dengan alasan ini, teori klasik disebut juga dengan teori kuantitas uang (*quantity theory of money*).

Secara spesifik, teori klasik menjelaskan bahwa tingkat harga secara umum ditentukan oleh hubungan antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dari uang. Apabila tingkat harga berada diatas tingkat keseimbangan, maka permintaan uang masyarakat melebihi jumlah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, sehingga pada akhirnya tingkat harga akan turun menuju tingkat keseimbangan, begitu pula sebaliknya. Sementara itu, pada tingkat harga keseimbangan maka jumlah kuantitas uang yang ingin dipegang oleh masyarakat sama dengan jumlah uang yang diedarkan oleh bank sentral.

Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah jika jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dari jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan akan terjadi inflasi. Namun sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar lebih

kecil dari jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi deflasi.

## 2. Teori Non Monetarist

Pandangan yang berbeda dari teori moneteris dapat digolongkan diantaranya adalah *Structuralist Theory* dan *Post Keynesian Theory*. Berbeda dengan teori inflasi klasik, teori strukturalis memandang bahwa inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Menurut Boediono (1998), teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Hal ini karena, inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian yang hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang. Penyebab inflasi berasal dari struktural perekonomian yang tidak mampu mengantisipasi dengan cepat perkembangan perekonomian. Teori ini menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural.

Teori struktural mencoba menganalisis bagaimana fenomena inflasi terjadi, mencari akar permasalahannya serta menganalisis hubungan diantaranya. Kebanyakan analisis teori strukturalis mencerminkan kasus inflasi di negara berkembang. Adanya goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya); atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*, kekakuan produksi, utang luar negeri, dan nilai tukar valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi

harga di pasar domestik. Karena sebab-sebab struktural ini, penambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, penawaran (*supply*) barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat. Penganut teori strukturalis dalam menyelesaikan permasalahan inflasi seringkali menggunakan pendekatan moneter dan fiskal.

Menurut teori Keynes, kuantitas uang bukanlah satu-satunya faktor penentu tingkat harga karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Keynesians menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika permintaan total (*agregat demand*) dari barang dan jasa melebihi total penawaran (*agregat supply*) saat keadaan *full employment* atau melebihi output potensialnya. Menurut Keynesian terdapat banyak faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat harga, seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran pemerintah dan pajak. Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan menyebabkan celah inflasi (*inflationary gap*). Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan

masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan. Inflasi akan berhenti apabila permintaan efektif total pada harga yang berlaku tidak melebihi jumlah output yang tersedia. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak serta merta dapat ditingkatkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya, sama seperti pandangan kaum monetarist, Keynesian model lebih banyak digunakan untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Model ini mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat *full employment* yang berarti bahwa tingkat pasokan produk (penawaran agregat) tidak dapat ditingkatkan lagi.

Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh peningkatan pengeluaran konsumsi, peningkatan investasi swasta (karena suku bunga kredit murah) serta peningkatan pengeluaran pemerintah (yang dibiayai dengan pencetakan uang baru).

#### **2.1.6 Penelitian Terdahulu**

Pada tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu dapat diketahui pengaruh antar variabel x dan y yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sinjo James Laoh (2014) Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Tahun 2003- 2012	Suku bunga, inflasi, dan penanaman modal dalam negeri	Nilai tukar, PDB	Suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, nilai tukar berpengaruh positif tidak signifikan, PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	<i>Journal of Business and Economics</i> Desember 2014 Vol. 13 No. 2 Hal. 153-169 ISSN: 1412-0070
2	Engla Desnim Silvia (2018) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Barat	Suku bunga dan penanaman modal dalam negeri	PDRB, keamanan	Suku bunga berpengaruh negatif, sedangkan PDRB dan keamanan berpengaruh positif terhadap penanaman modal dalam negeri.	Jurnal Imara, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018 Hal. 127-137 p-ISSN 2599-0985 e-ISSN 2622-1918

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Salman Alfarisi (2011) Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Krisis Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Tahun 1990-2010	Suku bunga dan penanaman modal dalam negeri	Krisis ekonomi	Suku bunga berpengaruh negatif, sedangkan krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap penanaman modal dalam negeri.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 2 Desember 2011 Hal. 197-206 ISSN 1693-2595
4	Eni Setyowati dan Siti Fatimah (2007) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 1980-2002	Inflasi, suku bunga, dan penanaman modal dalam negeri	PDRB, tenaga kerja	Suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tenaga kerja, inflasi, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8, No. 1, Juni 2007, Hal 62-84 ISSN 1411-6081 e-ISSN 2460-9331

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Komang Sri Ayu Puspita Dewi dan Luh Gede Meydiawathi (2017) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali	Suku bunga dan penanaman modal dalam negeri	Wisatawan mancanegara, PDRB, dan kebijakakn otonomi daerah	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, PDRB, dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	E-Jurnal EP Unud Vol. 6, No. 4 Apri; 2017 ISSN: 2303-0178
6	Chandra Tarigan, Tri Oldy Rotinsulu, Dank Rest D. Tolosang (2021) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi PMDN di Provinsi Sulawesi Utara Pada Tahun 2003-2018	Inflasi, suku bunga, dan penanaman modal dalam negeri	Jumlah tenaga kerja	Inflasi dan suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	Jurnal EMBA Vol.9 No. 2 April 2021, Hal. 516-522 ISSN 2303-1174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Sri Wahyuning dan Sindhu Rakasiwi (2014) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009	Inflasi dan penanaman modal dalam negeri	PDRB, angkatan kerja, dan infrastruktur	PDRB berpengaruh negatif signifikan dan inflasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, sedangkan angkatan kerja dan infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi Vol. 7, No 2 (2014) e-ISSN 2621-6248
8	Ferdila Dedy Utomo (2017) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PMDN di Jawa Tengah Tahun 1988-2015	Suku bunga dan penanaman modal dalam negeri	Pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja	Pengeluaran pemerintah dan suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	<i>Economics Development Analysis Journal</i> 6 (2) (2017) ISSN 225-6765



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Lea Widowati Sugiharto dan Akhmad Syakir Kurnia (2014) Dinamika PMA dan PMDN di Indonesia Sebagai Dampak dari Upah Minimum, Inflasi dan PDRB Tahun 2004-2012	Upah minimum, inflasi, penanaman modal dalam negeri	PDRB, penanaman modal asing	Upah minimum berpengaruh positif signifikan (jangka panjang) dan berpengaruh negatif tidak signifikan (jangka pendek), PDRB berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume XVII No. 3, Desember 2014 ISSN 1979-6471

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Azar Fuadi (2013) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 1985-2010	Suku bunga, inflasi, penanaman modal dalam negeri	PDRB	Suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan, PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	<i>Economics Development Analysis Journal</i> 2 (1) (2013) ISSN 2252- 6560
11	Dadang Sudirman (2017) Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Ekspor dan Inflasi Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Inflasi dan penanaman modal dalam negeri	Tenaga kerja dan ekspor	Tenaga kerja, ekspor, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	AL-ULUM ILMU SOSIAL DAN HUMANIOR A Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN:2476- 9576

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Samuel Richard Messakh dan Paulina Yuritha Amtiran (2019) Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Investasi Dalam Negeri di Indonesia	Inflasi, suku bunga, dan investasi dalam negeri	-	Inflasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	Messakh, Amtiran and Ratu / <i>Journal of Management (SME's)</i> Vol. 8, No.1, 2019, p.1-15 ISSN 2502-2385 e-ISSN 2723-469X
13	Frisnawati Yunus, Rostin, dan Wali Aya Rumbia (2019) Determinan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia	Suku bunga, inflasi, dan penanaman modal dalam negeri	PDB, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar	PDB berpengaruh positif tidak signifikan, pengeluaran pemerintah dan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan, inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan, nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019 Page: 91-100 e-ISSN: 2052-5171

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Didi Zainuddin, Anita Ria, dan Pudji Astuty (2021) Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah	Inflasi dan penanaman modal dalam negeri	Nilai tukar, dan belanja pemerintah daerah	Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan nilai tukar dan belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri.	<i>Journal of Applied Business and Economic</i> (JABE) Vol. 8 No. 2 (Desember 2021) p. 116-127

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Hubungan Antara Upah Minimum Provinsi dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Kebijakan penetapan upah minimum provinsi disuatu daerah akan memengaruhi penanaman modal dalam negeri. Tingginya upah minimum provinsi akan menyebabkan meningkatnya minat investasi, dimana meningkatnya penetapan upah minimum provinsi diharapkan sesuai dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dalam menetapkan upah minimum harus mempertimbangkan kepentingan dari pelaku usaha dan tenaga kerja karena pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga hubungan antara upah minimum provinsi dengan penanaman modal dalam negeri adalah positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Lea Widowati Sugiarto dan Akhmad Syakir Kurnia (2014) menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap penanaman modal dalam negeri pada jangka panjang. Sehingga, apabila upah minimum provinsi meningkat, maka nilai penanaman modal dalam negeri juga ikut meningkat.

### **2.2.2 Hubungan Antara Suku Bunga dengan Penanaman Modal Dalam Negeri**

Tingkat suku bunga akan memengaruhi penanaman modal dalam negeri di suatu daerah. Ketika tingkat suku bunga rendah maka investor akan berminat melakukan investasi, namun jika tingkat suku bunga tinggi maka minat investor untuk berinvestasi akan menurun. Hal ini karena, seorang investor akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana atau *cost of capital*. Semakin rendah tingkat suku bunga maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, karena biaya penggunaan dana juga semakin kecil. Sehingga hubungan antara suku bunga dengan penanaman modal dalam negeri adalah negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Setyowati dan Siti Fatimah (2007), Salman Alfarisi (2011), Azar Fuadi (2013), Sinjo James Laoh (2014), Ferdila Dedy Utomo (2017), Engla Desnim Silvia (2018), Samuel Richard Messakh dan Paulina Yuritha Amtiran (2019) menyatakan bahwa tingkat suku bunga

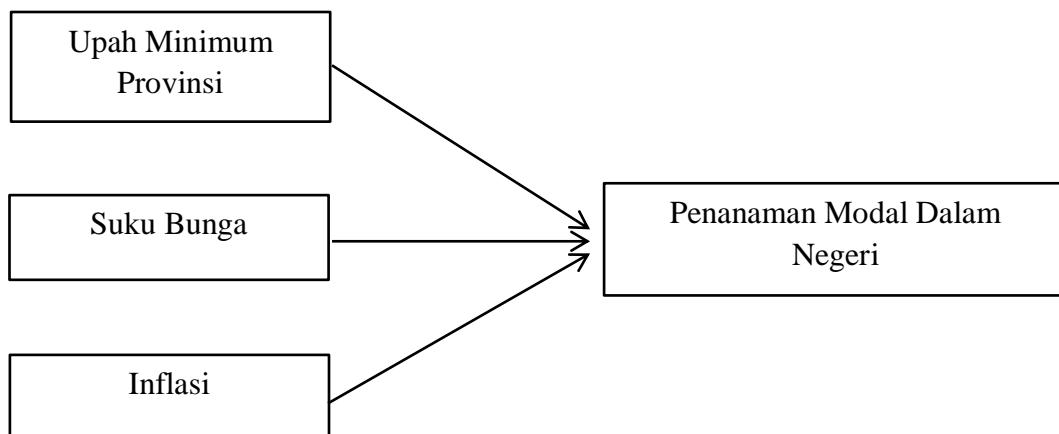
berpengaruh negatif terhadap investasi modal dalam negeri. Sehingga apabila suku bunga meningkat, maka nilai penanaman modal dalam negeri akan turun.

### **2.2.3 Hubungan Antara Inflasi dengan Penanaman Modal Dalam Negeri**

Inflasi di suatu daerah akan memengaruhi penanaman modal dalam negeri di daerah tersebut. Tingginya tingkat inflasi mengakibatkan penawaran uang atau *money supply* meningkat, selanjutnya diikuti dengan tingginya suku bunga, dengan suku bunga yang cenderung tinggi maka investasi akan menurun. Tingginya inflasi juga akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga mengakibatkan terjadi pengurangan pengembalian atau keuntungan investasi, hal ini mengakibatkan menurunnya minat investor untuk berinvestasi. Seorang investor akan cenderung melakukan investasi apabila tingkat inflasi disuatu negara dalam kondisi yang stabil. Hal ini karena dengan adanya kestabilan dalam tingkat inflasi maka tingkat harga barang-barang secara umum tidak akan mengalami kenaikan dalam jumlah yang signifikan. Sehingga hubungan antara inflasi dengan penanaman modal dalam negeri adalah negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinjo James Laoh (2014), Sri Wahyuning dan Sindhu Rakasiwi (2014), Lea Widowati Sugiharto dan Akhmad Syakir Kurnia (2014), Didi Zainuddin, Anita Ria, dan Pudji Astuty (2021) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penanaman modal dalam negeri. Sehingga apabila inflasi meningkat, maka nilai penanaman modal dalam negeri akan turun.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan upah minimum provinsi, suku bunga dan inflasi dengan penanaman modal dalam negeri digambarkan dalam skema sebagai berikut:



**Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Diduga upah minimum provinsi berpengaruh positif, sedangkan suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif secara parsial terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat periode 2002-2021.
2. Diduga upah minimum provinsi, suku bunga, dan inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat periode 2002-2021.